

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENGGGALIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Yeni Kuntari

Dosen Tetap STIE Widya Manggala

ABSTRACT

This research discusses the analysis of financial performance in central java province in 2005. The indicator of financial performance such as regional income ratio to national budget, regional income ratio to bruto regional domestic income, Lease ratio and regional retribution to original income, and per capita original income. The population in this research is all towns and sub-province in central java province. Then at the same time 4 sub-province and 4 towns are as samples. So the amount of sample in this research is 8 town or sub-province, whose sample has complete financial statement data in 2005. Sampling technique which is used in this research is purposive-judgement convenience sampling. The method of data collecting is book study and documentation study. Comparison analysis is used to compare between financial performance of town or sub-province in central java province so it can be known which town or sub province has low or high performance. The analysis showed that high financial performance in central java province is Surakarta. While low financial performance in central java province is Pekalongan. The result of this research also give recommendation that region must explore it's potential original income.

Key words : *financial performance, potential original income.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada awalnya kita mengenal adanya praktik-praktik akuntansi dalam pemerintahan yang menggunakan konsep Akuntansi Pemerintahan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tingkat pemerintah pusat serta APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk tingkat Daerah. Praktik akuntansi pemerintahan pada masa ini hanya sebatas pada pencatatan penganggaran dan realisasi dari pendapatan serta belanja yang dilakukan pemerintah. Tiap-tiap departemen akan menyesuaikan dengan sistem ini. Dalam perkembangannya akuntansi sektor publik (akuntansi pemerintahan) di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang " Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan

serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Sebagai peluang, otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dinikmati sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sebagai tantangan, otonomi daerah menuntut daerah harus lebih mandiri dengan cara mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat dalam berbagai aspek terutama dalam masalah otonomi fiskal. Oleh karena itu, upaya mengurangi ketergantungan dan kesalahan arah pembangunan sudah waktunya diakhiri dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus lebih mandiri terutama di bidang keuangan daerah karena dalam jangka panjang, injeksi dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus porsinya akan mengalami penurunan sesuai dengan kemandirian daerah.

Kemandirian suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kreativitas dan *entrepreneurship* pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi yang dimilikinya dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Sampai saat ini sumber pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten dan kota di Indonesia masih bertumpu pada dua sumber yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, namun dalam jangka panjang sumber tersebut tidak dapat diandalkan, karena cara tersebut hanya sebagai transfer beban pemerintah kepada masyarakat.

Upaya untuk menggali dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah karena jika tidak dikhawatirkan pendapatan asli daerah akan mengalami stagnasi. Daerah otonom yang kurang memiliki sumber daya alam yang memadai niscaya akan mendapat pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pusat dalam jumlah kurang memadai. Daerah otonom seperti ini mungkin akan dapat bertahan dan berkembang bila memiliki sumber daya lainnya seperti pariwisata, kerajinan, budaya, wisata alam, serta sumber daya manusia yang handal. Sebaliknya, daerah otonom yang mempunyai sumber daya alam yang masih terpendam namun memerlukan kapital yang besar untuk mengolahnya memerlukan uluran tangan dari luar agar sumber pendapatan asli daerah tersebut tetap dikembangkan dan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Penggunaan analisa rasio sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang sifatnya komersial. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial) analisis rasio keuangan (Riyanto, 1995) umumnya terdiri dari :

1. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera.
2. Rasio leverage yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditor.
3. Rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
4. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Sedangkan pada lembaga publik penggunaan analisis rasio khususnya terhadap keuangan pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena beberapa hal berikut :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah presentase tertentu. Oleh karena disusun dengan pendekatan secara *incremental* maka sering kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD.
3. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD-nya.

Menurut David (1993) dalam Amar (2003) kinerja keuangan daerah dapat dilihat dengan beberapa pendekatan yaitu :

1. nisbah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. nisbah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
3. kontribusi retribusi dan pajak daerah sebagai sumber pendapatan konvensional terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkapita.

Hasil analisa kinerja keuangan ini selanjutnya digunakan untuk mengetahui daerah-daerah yang memiliki kinerja ekonomi yang relatif baik.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis kinerja keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis kinerja keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan hasil analisis kinerja keuangan daerah lain yang terdekat ataupun

yang potensi daerahnya relatif sama untuk mencermati posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2005 jika dilihat dari pendekatan Nisbah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Nisbah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkapita ?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan kabupaten/kota jika dibandingkan dengan kinerja rerata ?

LANDASAN TEORI

Kinerja keuangan

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2002).

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan (Munawir, 2001).

Dalam organisasi sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan rugi laba, laporan arus kas, neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Bentuk laporan keuangan pada dasarnya dapat diadaptasikan dari laporan keuangan pada sektor swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengakomodasikan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Namun demikian, laporan keuangan sektor publik tidak dapat disamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan non moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik (Mardiasmo, 2002).

Pada umumnya laporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah atau sektor publik adalah laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, neraca daerah, laporan surplus atau defisit. Bagi organisasi Pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain :

1. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik.
2. Investor takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi.
3. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
4. Kualitas keputusan menjadi buruk.
5. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual.

Pendapatan Daerah

Definisi pendapatan menurut IASC *Frame Work* adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas, atau peningkatan aset/aktiva, atau pengeluaran utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana, selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana. Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan memaksimalkan kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002) yang meliputi :

1. Pajak Daerah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air di bawah tanah, dan pajak air permukaan.
2. Retribusi daerah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi trayek kendaraan penumpang, dan lain-lain.
3. Bagian laba usaha daerah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yaitu penerimaan-penerimaan yang berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro.

Pengertian Kabupaten dan Kota

Kabupaten adalah daerah pemerintahan tingkat II yang dikepalai oleh Bupati, berada di atas beberapa kecamatan dan setingkat dengan kotamadya (Kamus Pelajar, 2003). Sebagian besar kabupaten dalam kegiatan ekonominya masih mengandalkan pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga sumbangan terbesar untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)nya berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan.

Kota adalah daerah pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan atau daerah dengan bangunan perkantoran, usaha dagang, dan perumahan dengan jalan-jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain (Kamus Pelajar, 2003). Sedangkan menurut undang-undang RI No.22 tahun 1999 yang dimaksud dengan

kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kota sudah tidak lagi mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan tetapi lebih mengandalkan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pengertian kota menurut Prof. Bintarto jika dilihat dari segi geografis adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialitis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Analisis kinerja keuangan daerah

Kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individual tentang laporan keuangan yang dibuat secara terus menerus (Erich A. Halfert, 1997). Penilaian kinerja menurut Mulyadi dan Johny Setyawan (1999) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumberdaya manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi.

Sedangkan pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2002). Pengukuran sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud berikut, yaitu :

1. untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dan membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
2. untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota yang berada di propinsi Jawa Tengah, jadi jumlah populasinya sebanyak 35 kabupaten atau kota. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 kabupaten dan 4 kota yang berada di propinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang digunakan sebagai sampel adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati dan Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kota yang digunakan sebagai sampel adalah Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *Purposive-Judgement Convenience Sampling* yaitu cara memilih anggota dari populasi untuk dijadikan sampel berdasarkan pertimbangan/tujuan tertentu, kemudian diambil sampel yang termudah.

Teknik Analisis Data

Analisis kinerja keuangan masing-masing kabupaten/kota diukur berdasarkan pendekatan David N. (1993) dalam Amar (2003), yaitu menghitung :

1. Nisbah antara Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Nisbah antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto.
3. Kontribusi pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan konvensional terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah.
4. besaran Pendapatan Asli Daerah Perkapita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data

Secara ringkas data keuangan daerah kabupaten/kota adalah seperti tertera pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
 Data Keuangan Daerah
 Kabupaten/Kota Jawa Tengah
 Tahun 2005 (dalam ribuan, kecuali jumlah penduduk)

Nama Kabupaten	Realisasi Pendapatan (Rp)	PAD 2005 (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi pjk hotel (Rp)	Penduduk (jiwa)	Realisasi Retribusi (Rp)	PDRB Harga berlaku (Rp)
Cilacap	565.921.137	66.460.237	29.334.930	509.320	1.674.210	22.769.360	34.139.858.190
Grobogan	565.921.137	66.460.237	29.334.930	509.320	1.674.210	22.769.360	34.139.858.190
Pati	491.122.000	57.150.613	12.108.674	356.331	1.213.664	33.189.823	4.504.896.920
Wonogiri	452.255.414.	36.252.036	6.219.813	104.405	1.010.456	17.058.324	3.054.779.010
Magelang	192.088.702	28.643.563	4.177.407	774.376	130.732	17.061.077	11.144.555.970
Pekalongan	192.501.499	15.192.711	6.974.865	794.154	284.112	4.410.415	8.450.779.210
Salatiga	191.383.605	27.784.725	5.818.340	866.924	175.967	14.961.795	8.584.026.540
Surakarta	366.098.564	62.602.084	28.264.399	7.900.000	534.540	28.652.693	10.453.952.600

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka, 2006

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan daerah Kabupaten Cilacap selama tahun 2005 tercatat sebanyak Rp565.921.137.000 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp66.460.237.000 yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp29.334.930.000, retribusi daerah sebanyak Rp22.769.360.000, bagian laba usaha milik daerah sebanyak Rp5.506.494.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp8.849.453.000. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah selama tahun 2005 sebanyak Rp551.365.880.000. Dari data tersebut pada tahun 2005 keuangan kabupaten Cilacap terjadi surplus sebanyak Rp14.555.257.000.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Cilacap yang meliputi sektor perindustrian, pertanian/perikanan, perdagangan, hotel dan restoran mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap total PDRB. Pendapatan Domestik Regional Bruto kabupaten Cilacap pada tahun 2005 sebanyak Rp 34.139.858.190.000.

Realisasi penerimaan daerah kabupaten Grobogan selama tahun 2005 tercatat sebanyak Rp457.888.044.000 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp47.681.677.000 yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp21.749.631.000, retribusi daerah sebanyak Rp21.749.631.000, bagian laba usaha milik daerah sebanyak Rp1.815.233.000 dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp8.325.302.000.

Realisasi penerimaan daerah kabupaten Pati selama tahun 2005 tercatat sebanyak Rp491.122.000.000 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp57.150.613.000 yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp12.108.674.000, retribusi daerah sebanyak Rp33.189.823.000, bagian laba usaha milik daerah sebanyak Rp4.389.037.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp7.463.079.000. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah selama tahun 2005 sebanyak Rp453.304.272.000 sehingga pada tahun 2005 keuangan kabupaten Pati terjadi surplus sebanyak Rp37.817.728.000.

Realisasi penerimaan daerah kabupaten Wonogiri selama tahun 2005 tercatat sebanyak Rp452.255.414.000 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp36.252.036.000 yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp6.219.813.000, retribusi daerah sebanyak Rp17.058.324.000, bagian laba usaha milik daerah sebanyak Rp5.763.745.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp 7.210.153.000. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah selama tahun 2005 sebanyak Rp441.082.709.000 sehingga pada tahun 2005 Kabupaten Wonogiri terjadi surplus sebanyak Rp11.172.705.

Realisasi penerimaan daerah Kota Magelang selama tahun 2005 tercatat sebanyak Rp192.088.702.000 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp28.643.563.000 yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp4.177.407.000, retribusi sebanyak Rp17.061.077.000, bagian laba usaha milik daerah sebanyak Rp2.919.858.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp4.485.220.000. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah selama tahun 2005 sebanyak Rp164.960.090.000 sehingga pada tahun 2005 Kota Magelang terjadi surplus sebanyak Rp27.128.612.000.

Realisasi penerimaan daerah kota Pekalongan selama tahun 2005 tercatat sebanyak Rp192.501.499.000 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp15.192.711.000 yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp6.974.865.000, retribusi daerah sebanyak Rp4.410.415.000, bagian laba usaha milik daerah sebanyak Rp971.254.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp2.836.177. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah selama tahun 2005 sebanyak Rp179.445.904.000 sehingga pada tahun 2005 Kota Pekalongan terjadi surplus sebanyak Rp13.055.595.000.

Hal ini terjadi karena sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan yang merupakan primadona di kota Pekalongan mengalami kenaikan yang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan

tertinggi terhadap ekonomi kota Pekalongan yaitu sebesar 25%, sementara sektor keuangan yang diharapkan sebagai penunjang perekonomian memberikan peran 12%. Peranan sektor pertanian masih cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu memberi andil sebesar 10%.

Realisasi penerimaan daerah Kota Salatiga selama tahun 2005 tercatat sebanyak Rp191.383.605.000 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp27.784.725.000 yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp5.818.340.000, retribusi sebanyak Rp14.961.795.000, bagian laba usaha milik daerah sebanyak Rp1.724.357.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp5.280.234.000. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah selama tahun 2005 sebanyak Rp172.292.837.000 sehingga pada tahun 2005 Kota Salatiga terjadi surplus sebanyak Rp 19.090.768.000. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama, sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB. Kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB kota Salatiga adalah dari retribusi daerah.

Realisasi penerimaan daerah Kota Surakarta selama tahun 2005 tercatat sebanyak Rp366.098.564.000 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp62.602.084.000 yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp28.264.399.000, retribusi sebanyak Rp28.652.693.000, bagian laba usaha milik daerah sebanyak Rp4.991.628.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp693.265.000. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah selama tahun 2005 sebanyak Rp318.941.418.000 sehingga pada tahun 2005 Kota Surakarta terjadi surplus sebanyak Rp47.157.146.000. Sebagai salah satu pasar tekstil terbesar di Indonesia yaitu Pasar Klewer yang terletak di Kota ini akan sangat menguntungkan. Kontributor sektor perdagangan sangat dominan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia dengan keberadaan Kraton Surakarta Hadiningrat, maka sektor perhotelan dan pajak daerah menjadi andalan daerah ini serta menjadi kontributor utama dan pemberi andil terbesar dalam PDRB. Kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kota.

Adapun mengenai indikator kinerja keuangan daerah Jawa Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2
Indikator Kinerja Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2005

No.	Kabupaten / Kota	A	B	C	D
1	Kabupaten Cilacap	0,12	0,002	0,78	Rp39.696,48
2	Kabupaten Grobogan	0,11	0,018	0,91	Rp35.733,21
3	Kabupaten Pati	0,12	0,013	0,79	Rp47.089,32
4	Kabupaten Wonogiri	0,08	0,012	0,64	Rp35.876,91
5	Kota Magelang	0,15	0,003	0,74	Rp219.101,40
6	Kota Pekalongan	0,08	0,002	0,75	Rp53.474,37

No.	Kabupaten / Kota	A	B	C	D
7	Kota Salatiga	0,15	0,003	0,75	Rp157.897,40
8	Kota Surakarta	0,17	0,006	0,91	Rp117.113,40
	Rerata Jawa Tengah	0,12	0,01	0,78	Rp88.247,81

Sumber : Data Sekunder (BPS Propinsi Jawa Tengah, 2006) yang diolah

Keterangan :

- A** = **Nisbah PAD terhadap APBD**

$$\frac{\text{PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2005}}{\text{APBD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2005}}$$
- B** = **Nisbah PAD terhadap PDRB**

$$\frac{\text{PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2005}}{\text{PDRB kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2005}}$$
- C** = **Nisbah Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD**

$$\frac{\text{Pajak dan retribusi kabupaten/kota di Propinsi Jateng tahun 2005}}{\text{PAD kabupaten/kota di Propinsi Jateng tahun 2005}}$$
- D** = **PAD perkapita**

$$\frac{\text{PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2005}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2005}}$$

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa jika dilihat dari Nisbah PAD terhadap APBD bila dibandingkan dengan rerata Jawa Tengah maka kinerja keuangan yang baik atau tinggi adalah Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Surakarta. Kinerja keuangan yang tertinggi yaitu sebesar 17% adalah kota Surakarta, hal ini dikarenakan Kota Surakarta mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang relatif tinggi yaitu sebesar Rp62.602.084.000 dibanding kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel. Sedangkan kinerja keuangan terendah yaitu sebesar 8% adalah Kota Pekalongan, hal ini dikarenakan kota Pekalongan mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang paling rendah dibanding kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel yaitu hanya sebesar Rp15.192.711.000.

Jika dilihat dari Nisbah PAD terhadap PDRB bila dibandingkan dengan rerata Jawa Tengah maka kinerja yang baik atau tinggi adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati dan Kabupaten Wonogiri. Kinerja keuangan yang tertinggi yaitu sebesar 1,8% adalah Kabupaten Grobogan, hal ini berarti Kabupaten Grobogan mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan ekonomi di wilayah ini dalam PDRB (Pendapatan Domestik Regional

Bruto)nya, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah PDRB yang terendah diantara kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel yaitu hanya sebesar Rp2.594.031.640.000. Sedangkan kinerja keuangan terendah yaitu sebesar 0,2% adalah kabupaten Cilacap dan Kota Pekalongan, hal ini berarti kedua daerah ini mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak terlalu berpengaruh terhadap Pembentukan ekonomi bila dibandingkan dengan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)nya.

Jika dilihat dari nisbah pajak dan retribusi daerah terhadap PAD bila dibandingkan dengan rerata Jawa Tengah maka kinerja keuangan yang baik atau tinggi adalah Kabupaten Grobogan, kabupaten Pati serta Kota Surakarta. Kinerja keuangan yang tertinggi yaitu sebesar 91% adalah Kota Surakarta, hal ini dikarenakan kota Surakarta merupakan kota yang maju dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran hal ini dapat dibuktikan dalam PDRBnya bahwa sektor tersebut merupakan kontributor tertinggi. Bisa dipahami karena Kota Surakarta termasuk salah satu kota perdagangan tekstil terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia, Kota Surakarta juga diuntungkan dalam hal perhotelan, pajak serta retribusi. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah yang tinggi pula dalam pembentukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di kota Surakarta. Kinerja keuangan terendah yaitu sebesar 64% adalah kabupaten Wonogiri, hal ini dikarenakan kabupaten Wonogiri masih mengandalkan sektor primer yaitu pertanian dalam pembentukan PDRBnya sehingga Kabupaten Grobogan mempunyai penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi yang kecil dalam pembentukan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Jika dilihat dari Nisbah PAD Perkapita bila dibandingkan dengan rerata Jawa Tengah maka kinerja keuangan yang baik atau tinggi adalah Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Surakarta. Kinerja keuangan yang tertinggi yaitu sebesar Rp219.101 adalah Kota Magelang, hal ini dikarenakan Kota Magelang merupakan kota yang mempunyai jumlah penduduk yang paling rendah bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 130 732 jiwa. Sedangkan kinerja keuangan terendah yaitu sebesar Rp 35.733 adalah kabupaten Grobogan. Hal ini dikarenakan kabupaten Grobogan walaupun mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup lumayan (bukan yang terendah di antara kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel) namun mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat yaitu sebanyak 1.334.380 jiwa, sehingga menghasilkan PAD Perkapita paling rendah diantara kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel.

Hasil Analisis Komparasi

Dengan menggunakan empat indikator tersebut, ternyata kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah yang dijadikan sampel, jika dibandingkan dengan kinerja keuangan rata-rata Jawa Tengah yang relatif baik atau tinggi adalah kota Surakarta. Hal ini terjadi karena kota tersebut secara ekonomis berada pada posisi yang strategis. Kota Surakarta terletak pada daerah bisnis yang merupakan pusat penjualan tekstil terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Selain peran sebagai kota perdagangan, Kota Surakarta juga berperan sebagai kota

tujuan wisata di Indonesia. Keberadaan Kraton Surakarta Hadiningrat menjadikan daerah Surakarta sebagai daerah wisata budaya. Relatif tingginya kinerja keuangan daerah dikarenakan relatif tingginya Pendapatan Asli Daerah terutama dari pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh daerah tersebut.

Tingginya kinerja keuangan kota Surakarta dikarenakan kota Surakarta merupakan pusat perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran ternyata paling tinggi dalam pembentukan PDRB kota Surakarta dibandingkan delapan sektor lainnya. Selain itu tingginya kinerja keuangan kota Surakarta dikarenakan tingginya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah

Dari delapan kabupaten dan kota yang dibandingkan ternyata kinerja keuangan daerah yang relatif paling rendah adalah kota Pekalongan, hal ini dikarenakan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kota Pekalongan. Relatif rendahnya perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah kota Pekalongan dalam mengelola potensi daerahnya. Sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi wilayahnya, sehingga proses pelaksanaan transformasi ekonomi di Kota Pekalongan berjalan sangat lambat. Perkembangan potensi daerah Kota Pekalongan yang pada waktu akhir-akhir ini sangat mencolok adalah sektor industri tekstil. Batik Pekalongan pada waktu-waktu ini telah mampu menggeser popularitas batik Solo dan Batik Yogyakarta. Namun sayangnya, daerah ini hanya mampu menjadi daerah produsen saja, sementara untuk perdagangan masih mengandalkan Pasar Klewer di Kota Surakarta sebagai pusat peredaran Batik Pekalongan. Para pedagang Batik Pekalongan malah menggunakan fasilitas areal parkir pasar cendera mata di Pasar Klewer tersebut (Kompas, 2007).

Melihat kenyataan ini seharusnya pemerintah Kota Pekalongan memberikan perhatian lebih, diantaranya menyediakan area perdagangan baik grosir maupun eceran seperti halnya Pasar Klewer. Dengan demikian pedagang Batik Pekalongan tidak hanya menumpang di wilayah lain namun memiliki area perdagangan di wilayahnya sendiri. Banyak keuntungan bagi pemerintah Kota Pekalongan seandainya memiliki pasar grosir batik Pekalongan, di antaranya adalah retribusi daerah dapat ditingkatkan dan kehidupan perekonomian masyarakat lebih baik lagi. Bahkan dapat dimungkinkan permintaan pasar akan meningkat mengingat Kota Pekalongan lebih dekat dengan pelabuhan sebagai sarana transportasi antar daerah/pulau lain. Dengan permintaan yang semakin meningkat maka produksi dapat ditingkatkan dan pada akhirnya akan semakin membawa dampak positif bagi perekonomian rakyat. Potensi tekstil lain yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah sentra produksi jeans lokal. Produksi jeans lokal dari Pekalongan belum begitu dikenal masyarakat di daerah lain. Ini menjadi alasan lagi bagi pemerintah Kota Pekalongan untuk memiliki pasar sentra tekstil seperti Pasar Klewer, serta lebih gencar mempromosikan daerahnya ke daerah lain.

PENUTUP**Kesimpulan**

Dari analisis komparasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ternyata daerah-daerah yang memiliki kinerja ekonomi yang relatif baik cenderung memiliki perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi. Dengan demikian upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah haruslah diawali dengan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai basis Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah tanpa di dukung oleh aktivitas ekonomi masyarakat akan membebani dan menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan terjadinya bentuk ketidakadilan secara terselubung.

Walaupun kabupaten dan kota mempunyai Nisbah PAD terhadap APBD, Nisbah PAD terhadap PDRB, Nisbah Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD, dan PAD Perkapita yang tinggi belum menjamin bahwa kabupaten atau kota mempunyai kinerja keuangan yang tinggi atau baik. Mungkin saja dalam kabupaten atau kota tersebut belum mempunyai kesiapan kemampuan institusi dalam bentuk peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum bagi pihak eksekutif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang berbeda dan dengan sampel yang lebih banyak. Selain itu juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi sebelum diuji, misalnya kemampuan institusi dalam mengelola PAD (Pendapatan Asli Daerah), pertumbuhan ekonomi dan dengan menggunakan indikator kinerja keuangan lainnya.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk lebih intens menggali potensi pendapatan asli di daerah-daerah agar dapat diketahui dan digunakan untuk pengembangan dan acuan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah dan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim^a. 2004. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. CV Duta Nusindo. Semarang.

_____^b. 1999. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. CV.Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.

_____^c. 2003. Kamus Pelajar.Edisi 1. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

_____^d. 2006. Kabupaten Cilacap Dalam Angka. BPS. Cilacap

_____^d. 2006. Kabupaten Grobogan Dalam Angka. BPS. Grobogan

_____^e. 2006. Kabupaten Pati Dalam Angka. BPS. Pati.

_____^f. 2006. Kabupaten Wonogiri Dalam Angka. BPS. Wonogiri

- _____ h. 2006. Jawa Tengah Dalam Angka. BPS. Jawa Tengah
- _____ i. 2006. Kota Magelang Dalam Angka. BPS. Magelang
- _____ j. 2006 Kota Surakarta Dalam Angka. BPS. Surakarta
- _____ k. 2006. Kota Pekalongan Dalam Angka. BPS. Pekalongan.
- _____ l. 2006. Kota Salatiga Dalam Angka. BPS. Salatiga.
- _____ m. 2001. Pendapatan Regional Jawa Tengah. BPS. Semarang.
- Amar, Syamsul. 2003. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi*, Volume 11, April 2003.
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Pengantar Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Baswir, Revrison. 1997. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 10.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul . 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Hyman, David N (1993). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. Boston, Irwin Inc.
- Helfert, A. Erich, D.B.A. 1997. *Tehnik Analisis Keuangan*. Edisi 8. Erlangga. Jakarta. Edisi Bahasa Indonesia
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi dan Johny Setyawan. 1999. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Munawir, S. 2001. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi 4. Liberty. Yogyakarta.
- Riyanto, Bambang. 1999. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.
- Setiawan, E. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yayasan Widya Manggala Indonesia. Semarang.
- Sugiyono. 2000. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Ulum, M.D.Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Universitas Muhammadiyah. Maiang.